

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep dan Teori Penelitian

Dalam melakukan analisis peningkatan konflik interkomunal di Darfur pasca misi perdamaian UNAMID, peneliti akan menggunakan konsep serta teori yang dapat mempermudah dan membantu peneliti dalam menjelaskan pembahasan.

2.1.1 Teori Peacebuilding

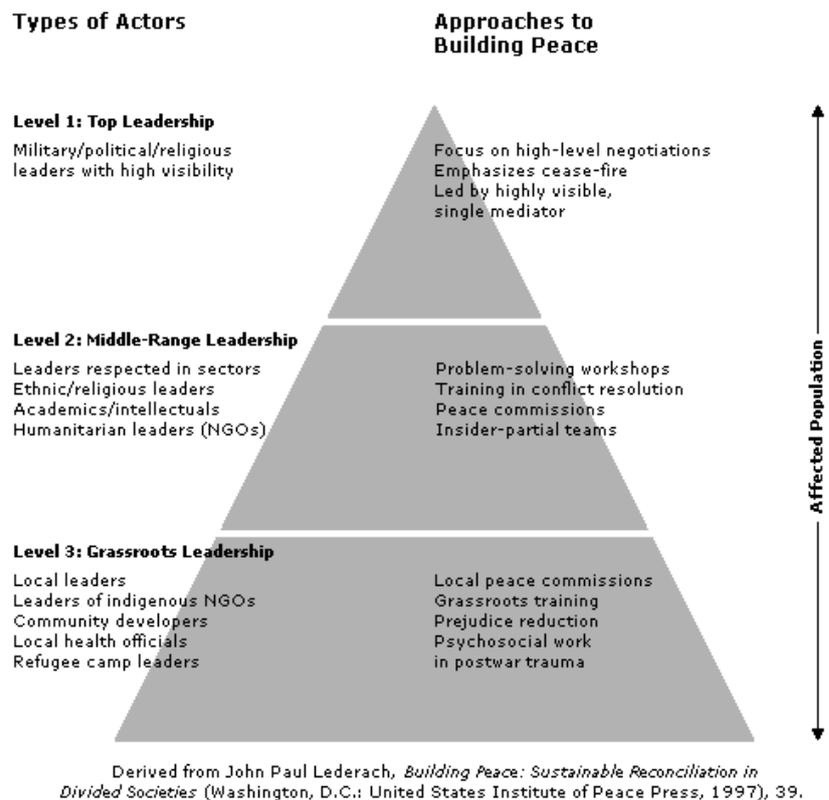
Peacebuilding atau pembinaan perdamaian merupakan serangkaian proses, pendekatan, dan tahapan yang diperlukan untuk mengubah konflik menuju hubungan berkelanjutan dan keadaan yang damai (Lederach, 1997). Lederach juga menjelaskan bahwa pembinaan perdamaian juga melibatkan pada sebuah transformasi dalam hubungan antar manusia serta berakhirnya kekerasan karena pembinaan perdamaian memiliki sifat yang transformatif. Menurut Rama Mani, pembinaan perdamaian tidak hanya merupakan sebuah proses dinamis yang pada dasarnya merupakan tugas politik tetapi juga merupakan proses sosial dan asosiatif yang membangun kembali hubungan yang rusak antara pihak-pihak yang terlibat konflik dan masyarakat (Mani, 2002). Berdasarkan argumen-argumen tersebut, dapat dikatakan bahwa pembinaan perdamaian membutuhkan koneksi antara intervensionis dan masyarakat lokal mengenai pengetahuan kebudayaan dan sosial yang lebih mendalam.

Pengaktualisasian pembinaan perdamaian dapat dilakukan melalui rekonstruksi sosial akibat dari hubungan yang telah retak dari konflik yang terjadi. Selain kondisi sosial, pembinaan perdamaian juga melibatkan pembangunan kondisi politik, militer, ekonomi, hukum, struktural, kultural yang dibutuhkan untuk mempromosikan kondisi yang damai dalam daerah konflik (Lambourne & Herro, 2008). Hal ini berarti mengakhiri keadaan kekerasan yang biasanya berupa dengan konflik bersenjata maupun diskriminasi sosial dan ekonomi sehingga tercipta keadaan keadilan yang sama rata. Tidak dapat dipungkiri ketika membicarakan tentang pembinaan perdamaian terdapat pendekatan-pendekatan

yang harus dilakukan dalam tiap tingkatannya. Hal ini berkaitan dengan teori pasca-strukturalis tentang pembinaan perdamaian atau *post-structuralist theory of peace building*.

Dalam versi pasca-strukturalis melihat pembinaan perdamaian dalam isu-isu keadilan, kesetaraan, dan hubungan kekuasaan, tetapi juga memberi penekanan utama pada aktor dan wacana-wacana yang telah terpinggirkan. Pembinaan perdamaian juga bukan hanya mengenai narasi sederhana yang bersifat umum, namun juga bagaimana memahami perbedaan dan juga memasukkan wacana perdamaian dalam tingkatan sehari-hari penduduk lokal ke dalam debat internasional (Indira Gandhi National Open University, 2017). Selanjutnya terdapat pendekatan yang dikembangkan oleh John Paul Lederach yang bernama *Conflict Transformation School*. Pendekatan ini berangkat dari dilema manajemen konflik jangka pendek dan pembangunan hubungan jangka panjang yang dinilai tidak dapat menyelesaikan konflik secara keseluruhan. Dalam melakukan identifikasi tingkatan-tingkatan terkait dalam melakukan pembinaan perdamaian, Lederach mengusulkan piramida pendekatan pembinaan perdamaian sebagai berikut;

Gambar 2.1 Model Piramida Pendekatan Pembinaan Perdamaian oleh John Paul Lederach



Sumber: (Lederach, 1997)

Dalam piramida pendekatan pembinaan perdamaian yang diajukan oleh Lederach di atas, dapat dimengerti bahwa terdapat tiga tingkatan dalam dimensinya. *Top-Level Leadership* terdiri dari para pemimpin politik, militer, dan religius. Mereka merupakan aktor dengan tingkat representatif yang tinggi dalam konflik yang terjadi. Selain itu, tingkatan ini juga memiliki fokus dalam melakukan negosiasi tingkat tinggi dan memiliki kekuatan serta atensi yang tinggi dengan media dalam sebuah konflik. Tingkatan ini juga menjadi kunci bagi komunitas internasional dalam merasakan konflik yang terjadi. Pada tingkatan yang kedua terdapat *Middle-Range Leadership* yang terdiri dari para individual yang memiliki jabatan pada komunitasnya seperti pemimpin keagamaan, edukasi, bisnis, kesehatan dan lain-lain. Dalam tingkatan ini, fokusnya adalah seperti melakukan lokakarya mengenai pemecahan permasalahan dan melakukan pelatihan dalam resolusi konflik. Tingkatan ini menjadi jembatan bagi tingkatan pertama dan tingkatan ketiga, yang berarti aktor dalam tingkat menengah merupakan aktor yang memiliki hubungan dengan tingkat pertama dan juga menjadi representatif bagi tingkat ketiga dalam konteks yang lebih luas. Tingkatan ketiga adalah *Grassroots*

Leadership sebagai tingkatan yang merepresentasikan basis dari massa atau komunitas lokal sehari-hari. Orang-orang yang terlibat dalam tingkatan ini merupakan mereka yang mengerti penderitaan dan ketakutan yang dialami masyarakat yang terdampak oleh konflik.

Pada tahun 2014, Thania Paffenholz mengeluarkan analisis terkait dengan teori pembinaan perdamaian transformatif milik Lederach yang ditinjau selama 20 tahun sejak teori tersebut dikemukakan. Teori pembinaan perdamaian transformatif telah mempengaruhi pergeseran dimensi *peacebuilding* dari internasional menjadi lokal, namun hal ini dapat dinilai gagal dalam beberapa aspek karena hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Hal-hal tersebut dapat dirangkum menjadi: (1) pemahaman khusus tentang ‘lokal’ oleh ‘internasional’; (2) strategi dukungan internasional yang dinilai sempit, mengabaikan arena pembinaan perdamaian internasional, regional dan lokal yang lebih luas, dan hubungan kekuatan yang telah ada; dan (3) status dari pendekatan tingkat menengah milik Lederach sebagai teori perubahan yang hampir tak terbantahkan dalam pembinaan perdamaian masyarakat sipil (Paffenholz, 2014). Berdasarkan analisis dari Paffenholz tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun pemikiran Lederach telah mempengaruhi perubahan yang besar dalam paradigma pembinaan perdamaian dalam skala internasional, masih terdapat beberapa perubahan yang harus dilakukan untuk menemukan solusi terbaik.

Dalam konsekuensinya, temuan dari Paffenholz menyarankan bahwa temuannya tersebut memerlukan strategi dukungan yang berbeda dalam pembinaan perdamaian masyarakat sipil yang mencakup aktor tingkat pertama dan aktor eksternal. Tingkat kedua juga merupakan entitas yang penting dan relevan dalam teori ini, namun sebaiknya konteks regional dan lokal dalam tempat mereka melakukan operasi juga harus diperhatikan dan bagaimana cara aktor masyarakat sipil tertentu diprioritaskan dengan menghiraukan aktor-aktor lainnya merupakan hal yang cukup bermasalah. Pada tingkatan yang ketiga, ketika membicarakan mengenai masyarakat, masyarakat perlu menyikapi secara terbuka dan menerima segala aspek dan sifat politis dari kompleksitas pembinaan perdamaian. Paffenholz menyebutkan bahwa masyarakat sipil tidak lagi dapat dilihat sebagai masyarakat homogen ‘baik’. Sebaliknya, keragaman dan perannya yang saling bertentangan

akan membantu membangkitkan potensi dalam melakukan pembinaan perdamaian harus ditanggapi secara terbuka oleh aktor eksternal berikut juga menyertai segala potensi perubahan dari berbagai aktor dalam fase-fase pembinaan perdamaian yang berbeda (Paffenholz, 2014).

Dari penjelasan mengenai pembinaan perdamaian di atas, penelitian yang dilakukan akan memiliki fokus terhadap pengimplementasian teori pembinaan perdamaian transformatif Lederach (1997) sebagai teori dasar yang telah diperbaharui melalui argumen serta analisis dari Paffenholz (2014). Pengimplementasian teori ini akan dilakukan terhadap peningkatan konflik interkomunal yang terjadi di Darfur pasca misi perdamaian UNAMID. Penelitian ini juga akan menganalisis pentingnya faktor eksternal serta relasinya dengan komunitas lokal dan para pemimpin komunitas untuk menemukan sebuah resolusi dari konflik yang terjadi.

2.1.2 Resolusi Konflik

Resolusi konflik merupakan situasi di mana pihak-pihak yang mengalami atau terlibat dalam konflik memasuki tahapan untuk menyelesaikan ketidakcocokan mereka, menerima kelanjutan keberadaan satu sama lain sebagai pihak dan menghentikan semua tindakan kekerasan terhadap satu sama lain (Wallensteen, 2019). Ketika telah berakhirnya perang maupun konflik bersenjata yang menyebabkan jatuhnya banyak korban, kedamaian belum tentu tercapai. Perdamaian tidak dapat dipastikan hanya dengan berakhirnya perang, dengan luasnya definisi dari perdamaian itu sendiri, resolusi konflik tidak hanya sebatas berada pada berakhirnya konflik itu sendiri. Dalam resolusi konflik, kesepakatan antara pihak-pihak yang mengalami konflik untuk menghormati satu sama lain dan menghargai nilai-nilai kehidupan yang akan dijalani ke depannya merupakan hal yang sangat penting. Resolusi konflik sendiri juga merupakan hal yang bergantung kepada kesepakatan pihak-pihak yang mengalami konflik yang membuat hal tersebut bergantung pada bagaimana situasi yang sedang dialami.

Penggunaan konsep resolusi konflik dalam penelitian ini akan memiliki fokus pada penggunaan resolusi konflik untuk meminimalisir kekerasan komunal yang terjadi setelah misi perdamaian PBB. Konflik komunal sendiri didefinisikan

sebagai konflik kekerasan yang terjadi antara kelompok non-negara yang diorganisir bersama identitas komunal bersama (Brosché & Elfverson, *Communal conflict, civil war, and the state: Complexities, connections, and the case of Sudan*, 2012). Berdasarkan definisi tersebut dapat dielaborasi penggunaan konsep resolusi konflik sebagai upaya untuk mengatasi konflik interkomunal yang terjadi dan dalam konteks ini melalui kegiatan dari *United Nations Peacekeeping Operations* (UN PKOs) terhadap hal yang berhubungan dengan aktivitas pemimpin komunitas lokal dan penduduknya. Melalui pengadaan fasilitas untuk melakukan pembicaraan antara komunitas, dapat menghidupkan kembali koordinasi dan menghilangkan bias negatif yang ada di antara komunitas-komunitas tersebut (Smidt, 2019).

Smidt memanfaatkan interkoneksi antara UN PKOs dengan komunitas-komunitas yang mengalami konflik untuk penggunaan resolusi konflik dalam meminimalisir kekerasan komunal. Penelitian Smidt ini mengacu pada mekanisme yang diusulkan untuk memfasilitasi komunikasi secara lokal dengan tiga cara, yaitu:

1. mengalihkan fokus dari kelompok bersenjata dan elit politik ke pemimpin komunitas dan penduduk lokal;
2. menekankan bagaimana penjaga perdamaian dapat memperkuat mekanisme penyelesaian konflik yang berakar secara lokal;
3. melakukan evaluasi kegiatan dialog preventif di tingkat lokal.

Berdasarkan ketiga poin di atas, akan menjadi acuan penelitian ini sebagai konsep dari resolusi konflik yang akan dikaitkan dengan teori *peacebuilding*. Sebagaimana argumen yang telah dilontarkan oleh Smidt yang didasari oleh pandangan rasionalis dan sosial-psikologis mengenai kurangnya pertukaran antarkelompok yang dapat meningkatkan risiko kekerasan antarkelompok (Smidt, 2019).

Terdapat beberapa kemungkinan yang dapat mengurangi kesempatan untuk keberhasilan penanganan konflik dalam kasus intervensi oleh pihak eksternal. Kemungkinan tersebut terletak pada kecenderungan pihak eksternal dalam mengandalkan sampel atau informasi yang bias. Hal ini dapat terjadi akibat dari

kurangnya pengetahuan lokal yang mendalam dan dapat menimbulkan konsekuensi yang berbahaya. Hal ini juga dapat membuat para pihak eksternal cenderung mengandalkan narasi sederhana yang akan digunakan untuk melakukan intervensi tersebut (Autesserre, 2014). Penggunaan narasi sederhana dengan kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan lokal akan menimbulkan hasil yang tidak maksimal dalam meminimalisir konflik interkomunal. Namun, dalam penelitian ini, kehadiran Uni Afrika yang menjadi bagian dari UNAMID diharapkan dapat mengatasi permasalahan dari argumen Autesserre di atas.

2.2 Alur Pemikiran

Berakhirnya rezim pemerintahan Omar Al-Bashir menjadi titik awal peningkatan konflik interkomunal di Darfur. Lalu, keadaan ini menjadi semakin mengkhawatirkan ketika UNAMID memutuskan untuk mengakhiri mandatnya pada tahun 2020. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana resolusi konflik yang diterapkan dalam masa transisi dari *peacekeeping* menjadi *peacebuilding* untuk mengatasi konflik interkomunal.

